

Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Cianjur

Marsya Tri Amanda¹, Ii Sumantri²

¹Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia.
marsyatriamanda13@gmail.com

Keywords:
 Collaborative governance,
 Pengelolaan sampah,
 Kabupaten Cianjur,
 ISWMP,
 Bank sampah

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of collaborative governance in solid waste management in Cianjur Regency using the analytical framework of Ansell and Gash (2008), which encompasses four dimensions: starting conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative process. A qualitative literature study approach using secondary data was employed. The findings reveal that collaborative governance in Cianjur Regency is in an emerging stage, characterized by a strengthening regulatory framework including Regional Regulation No. 6 of 2021, Regional Regulation No. 10 of 2025, and the Solid Waste Management Master Plan ratified through Regent Regulation No. 26 of 2024 yet a significant gap between regulation and field implementation persists. The World Bank-supported ISWMP program successfully demonstrated multi-stakeholder collaboration in Sawahgede Village, yielding an average of 49–52 kg of sorted organic waste per day from a single neighborhood unit. The study concludes that the effectiveness of collaborative governance is largely determined by inter-actor trust, local facilitative leadership, and systematic replication of pilot programs across the regency.*

Kata Kunci:
 Collaborative governance,
 Solid waste management,
 Cianjur Regency,
 ISWMP,
 Waste bank

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Cianjur menggunakan kerangka analisis Ansell dan Gash (2008) yang mencakup empat dimensi: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif berbasis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance di Kabupaten Cianjur berada pada fase perkembangan awal, ditandai oleh kerangka regulasi yang semakin kuat meliputi Perda No. 6 Tahun 2021, Perda No. 10 Tahun 2025, dan RISPS yang disahkan melalui Perbup No. 26 Tahun 2024 namun masih terdapat kesenjangan signifikan antara regulasi dan implementasi. Program ISWMP yang didukung Bank Dunia berhasil mendemonstrasikan kolaborasi multipihak di Kelurahan Sawahgede yang menghasilkan rata-rata 49–52 kg sampah organik terpilah per hari dari satu RT. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas kolaborasi sangat ditentukan oleh kepercayaan antaraktor, kepemimpinan fasilitatif lokal, dan replikasi program secara sistematis ke seluruh wilayah kabupaten.*

Pendahuluan

Permasalahan sampah merupakan isu lingkungan yang bersifat kompleks dan multidimensional, karena berdampak langsung terhadap berbagai aspek kehidupan (Kanaya Avitadira & Indrawati, 2023). Sampah menjadi persoalan utama yang dihadapi pemerintah dalam pengelolaan lingkungan (Achmad, 2024). Pengelolaan sampah di Indonesia juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang menegaskan pentingnya pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan. Menurut *The Atlas of Sustainable Development Goals tahun 2023*, Indonesia menjadi negara dalam urutan kelima sebagai negara penghasil sampah terbesar di dunia (Susanti, 2023). Timbulan sampah di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 33,79 juta ton, dengan dominasi berasal dari sektor rumah tangga (SIPSN, 2024). Kapasitas pengelolaan sampah di Indonesia yang masih belum optimal, ditunjukkan oleh data tahun 2024 bahwa hanya sekitar 59,74% sampah yang berhasil ditangani, sementara sisanya masih belum terkelola dengan baik dan berpotensi mencemari lingkungan (SIPSN, 2024). Sampah yang terkelola pada tahun 2025 hanya sekitar 34,49% sementara sekitar 65,51% masih terbuang ke lingkungan (Gavrila, 2026). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara jumlah timbulan sampah dengan kapasitas pengelolaannya di tingkat nasional.



Gambar 1. Presentase Timbulan Sampah di Pulau Jawa Tahun 2024
Sumber: SIPSN Tahun 2024

Permasalahan pengelolaan sampah juga terjadi di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Cianjur yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

Timbulan sampah terbesar di Pulau Jawa dengan persentase sebesar 30,68% pada tahun 2024 adalah Provinsi Jawa Barat (SIPSN, 2024). Tingginya kontribusi tersebut dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang besar, yang pada tahun 2024 mencapai lebih dari 50 juta jiwa. Kondisi ini mendorong tingginya tingkat konsumsi masyarakat baik dari sektor rumah tangga maupun kegiatan ekonomi (Nur Alam et al., 2024). Kabupaten Cianjur memiliki jumlah penduduk sekitar 2,58 juta jiwa yang relatif lebih kecil dibandingkan daerah lain di Provinsi Jawa Barat, tetap menghadapi permasalahan pengelolaan sampah (Herlina et al., 2025). Pada tahun 2025, Kabupaten Cianjur menghasilkan 450 ton sampah per hari (DLH, 2025). Namun, dalam kurun waktu sembilan bulan pada tahun 2025, jumlah sampah yang berhasil diangkut ke TPA Mekarsari hanya mencapai 60.481 ton, dengan rata-rata sekitar 168 ton per hari (Nurmuslim, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Cianjur masih cukup signifikan.

Tabel 1. Timbulan Sampah di Kabupaten Cianjur 2023-2025

Tahun	Timbulan	Pengurangan Sampah	Penanganan Sampah
2023	462,637.86	0	727
2024	462,637.86	0	3,370.23
2025	400,161.44	3,736.28	9.001.71

Sumber: SIPSN Kab. Cianjur Tahun 2023-2025

Berdasarkan Tabel 1, timbulan sampah di Kabupaten Cianjur menunjukkan angka yang relatif tinggi dalam kurun waktu 2023–2025, meskipun pada tahun 2025 terlihat adanya penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, upaya pengurangan sampah masih tergolong rendah, terutama pada tahun 2023 dan 2024 yang menunjukkan angka nol, sementara peningkatan baru terlihat pada tahun 2025. Di sisi lain, penanganan sampah mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi belum sepenuhnya sebanding dengan besarnya timbulan sampah yang dihasilkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Cianjur masih belum optimal, baik dari aspek pengurangan maupun penanganannya.

Pengelolaan sampah yang efektif memerlukan pendekatan terpadu yang mencakup pengurangan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang (*reduce, reuse, recycle*).

Selain itu, pendekatan kolaboratif antaraktor, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Keterlibatan masyarakat dalam pemilahan dan pengurangan sampah dari sumbernya juga menjadi indikator keberhasilan pengelolaan sampah berkelanjutan (Javani & Iscahyono, 2024). Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, pengelolaan sampah di Kabupaten Cianjur masih belum optimal. Hal ini terlihat dari tingginya timbulan sampah yang tidak sebanding dengan kapasitas pengurangan dan penanganannya. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah juga masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Cianjur, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kolaborasi antaraktor dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah.

Tinjauan Literatur

Collaborative berasal dari kata *co* yang berarti bersama dan *labor* yang berarti bekerja, sehingga dapat dimaknai sebagai upaya penyatuan tenaga untuk mencapai tujuan yang telah disepakati (Choirul, 2020). Kolaborasi merujuk pada proses kerja bersama antarindividu, kelompok, maupun organisasi dalam mencapai tujuan tertentu serta menghasilkan output yang bernilai dan berkelanjutan. Menurut Munt dalam Raharja Samun Jaja (2009) mengemukakan bahwa dalam proses kolaborasi, terbentuk hubungan antarorganisasi yang menjadi dasar dalam membangun kerja sama yang efektif.

Collaborative governance menurut Ansell & Gash (2008) merupakan bentuk tata kelola yang melibatkan secara langsung aktor non-pemerintah dalam forum formal yang berorientasi pada konsensus untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik. Susianto dan Syanto (2014) dalam Pamungkas et al., (2024) menjelaskan bahwa model pembentukan *collaborative governance* diawali dengan analisis kondisi awal, perancangan kelembagaan, proses kolaborasi, kepemimpinan yang memfasilitasi, serta hasil dari kolaborasi itu sendiri. Pendekatan ini relevan mengingat pengelolaan sampah merupakan permasalahan kompleks yang memerlukan keterlibatan berbagai aktor,

sehingga kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat (Princia et al., 2026).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah. Penelitian oleh Setiawandari & Kriswibowo (2023) dalam artikel berjudul "*Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah*" menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di tingkat lokal. Selain itu, penelitian oleh Pamungkas et al., (2024) dalam artikel berjudul "*Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jember*" menemukan bahwa penerapan *collaborative governance* melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah daerah, sektor privat, dan masyarakat, yang dilaksanakan melalui tahapan *assessment*, *initiation*, *deliberation*, dan *implementation*.

Kedua penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji keterlibatan aktor secara komprehensif dalam skala kabupaten, khususnya di Kabupaten Cianjur. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Cianjur dengan melibatkan berbagai aktor, termasuk sektor swasta dan kelompok masyarakat, guna memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh terkait proses dan efektivitas kolaborasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan untuk menganalisis konsep *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Cianjur berdasarkan berbagai sumber pustaka. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan laporan resmi yang relevan. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data secara deskriptif, dan penarikan kesimpulan guna mengidentifikasi bentuk kolaborasi antaraktor serta faktor yang memengaruhi efektivitas *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah.

Hasil Penelitian

A. Kondisi Awal (*Starting Conditions*)

Berdasarkan model Collaborative Governance yang dikembangkan oleh Ansell & Gash (2008), dimensi pertama yang perlu dianalisis adalah kondisi awal (*starting conditions*), yakni kondisi yang melatarbelakangi dan mendorong terbentuknya kolaborasi antar aktor. Kondisi awal ini mencakup tiga variabel utama, yaitu: ketidakseimbangan sumber daya dan kapasitas antar pemangku kepentingan, sejarah kerja sama sebelumnya, dan insentif yang mendorong partisipasi dalam kolaborasi (Ansell & Gash, 2008).

Di Kabupaten Cianjur, kondisi awal yang paling menonjol adalah kesenjangan kapasitas yang signifikan antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2024 mencatat bahwa estimasi timbulan sampah harian di Kabupaten Cianjur mencapai ± 1.260 ton per hari, namun kapasitas pengangkutan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) hanya mampu mengangkut rata-rata 168 ton per hari ke TPAS Mekarsari, atau sekitar 13,3% dari total timbulan. Hal ini menunjukkan kesenjangan penanganan yang sangat besar dan menjadi pendorong utama perlunya kolaborasi lintas aktor.

Kondisi ketidakseimbangan sumber daya juga tercermin dari minimnya infrastruktur persampahan. TPAS Mekarsari di Kecamatan Cikalongkulon merupakan tempat pembuangan akhir (TPA) yang beroperasi di Kabupaten Cianjur setelah TPA Pasir Sembung di Kecamatan Cilaku ditutup dan diubah menjadi Ruang Terbuka Hijau pada Januari 2024 (Winata & Effendie, 2023). Volume sampah yang masuk ke TPAS Mekarsari rata-rata 200 ton per hari pada hari biasa, dapat meningkat hingga 570 ton per hari saat libur Lebaran (Fikri, 2025). Dengan jumlah timbulan yang jauh melampaui kapasitas tersebut, kondisi ini merepresentasikan tekanan ekologis yang serius sekaligus urgensi kolaborasi antar aktor. Kondisi geografis Kabupaten Cianjur yang luas dan beragam mencakup kawasan urban, perdesaan, dan pegunungan turut mempersulit distribusi layanan pengangkutan sampah secara merata (Virdhani, 2025).

Dari aspek sejarah kerja sama, Kabupaten Cianjur belum memiliki rekam jejak kolaborasi yang terstruktur dan berkesinambungan dalam pengelolaan sampah sebelum

tahun 2024–2025. Program-program yang pernah ada cenderung bersifat sektoral dan tidak melibatkan forum kolaborasi multistakeholder secara formal. Situasi ini sejalan dengan temuan Rizky et al., (2024) dalam penelitian di Kabupaten Bogor, yang menyimpulkan bahwa kolaborasi pengelolaan sampah belum berjalan optimal karena tidak didukung oleh sejarah kerja sama yang kuat dan mekanisme pembagian peran yang jelas antar pemangku kepentingan.

Adapun insentif yang mendorong lahirnya kolaborasi di Kabupaten Cianjur bersumber dari dua faktor: tekanan regulasi nasional dan dukungan program pembangunan internasional. Secara regulasi, UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan pendekatan terpadu dan partisipatif dalam pengelolaan sampah, sementara Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga mewajibkan daerah mencapai target pengurangan 30% dan penanganan 70% sampah pada tahun 2025. Secara eksternal, program ISWMP (Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project) yang didukung oleh Bank Dunia hadir sebagai stimulus kolaborasi dengan menyediakan pendampingan teknis, pembiayaan, dan kapasitas bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Tabel 2. Pemetaan Aktor dalam Collaborative Governance Pengelolaan Sampah di Kabupaten Cianjur

Aktor	Peran dalam Kolaborasi	Bentuk Keterlibatan
Pemerintah Daerah (DLH Kab. Cianjur)	Fasilitator, regulator, pelaksana teknis pengangkutan	Perbup No. 62/2024, UPTD Pengelolaan Sampah, armada angkut ke TPA Mekarsari
Pemerintah Pusat / ISWMP– Bank Dunia	Penyedia dana, pendampingan teknis, capacity building	Pilot project RT 03 RW 14 Kelurahan Sawahgede (Des 2024–Feb 2025)
PT PLN (Persero)	Mitra sektor swasta pengolah sampah menjadi energi	Kerjasama pengolahan sampah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP)

Aktor	Peran dalam Kolaborasi	Bentuk Keterlibatan
Bank Sampah (termasuk Bank Sampah Baraya)	Offtaker sampah terpilah, pemberdayaan ekonomi warga	Menerima sampah organik & anorganik terpilah; piagam bank sampah terbaik dari Bupati Cianjur
Masyarakat / Warga (RT/RW, Kelurahan)	Pelaku utama pemilahan sampah dari sumber	Pemilahan harian, penggunaan ember pilah & dropbox; 60 warga aktif di Sawahgede
Tokoh Masyarakat, Ormas Pemuda, Kelompok Perempuan	Agen perubahan perilaku sosial	Sosialisasi, mobilisasi warga, penguatan budaya pilah sampah

Sumber : DLH Kabupaten Cianjur 2024-2025

B. Desain Kelembagaan (Institutional Design)

Dimensi kedua dari model Ansell & Gash (2008) adalah desain kelembagaan (*institutional design*), yang merujuk pada struktur formal dan informal yang mengatur bagaimana proses kolaborasi diorganisasikan. Desain kelembagaan yang kuat ditandai oleh adanya aturan yang jelas, forum kolaborasi yang terstruktur, proses yang transparan, dan inklusivitas dalam partisipasi (Ansell & Gash, 2008).

Kabupaten Cianjur memiliki landasan regulasi yang relatif komprehensif dalam pengelolaan sampah. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah menjadi payung hukum utama yang mengatur tugas dan wewenang, kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, hak dan kewajiban berbagai pihak, kelembagaan dan kerja sama, partisipasi masyarakat, hingga ketentuan sanksi. Perda ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2025, yang merupakan perubahan atas Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2021, dengan penambahan sejumlah ketentuan baru terkait pengelolaan sampah spesifik, pembiayaan, larangan, dan ketentuan pidana.

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 62 Tahun 2024 tentang UPTD Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup menjadi instrumen penting pembentukan unit pelaksana teknis yang bertugas mengoperasionalkan layanan pengelolaan sampah di lapang. Pembentukan UPTD ini menandai langkah penguatan kelembagaan yang lebih spesifik dan akuntabel. Selain itu, Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah (RISPS) yang telah disahkan melalui Peraturan Bupati Cianjur Nomor 26 Tahun 2024 berfungsi sebagai peta jalan strategis jangka panjang yang menetapkan arah pembangunan infrastruktur, kerangka kebijakan, dan proyeksi pembiayaan pengelolaan sampah.

Namun, terdapat kesenjangan yang nyata antara desain kelembagaan formal dengan implementasinya di lapangan. Perda No. 6 Tahun 2021 telah mengatur kewajiban pemilahan sampah dari sumber sampah rumah tangga, akan tetapi dalam data SIPSN tahun 2024 menyebutkan bahwa angka pengurangan sampah di Kabupaten Cianjur masih tercatat nol pada tahun 2023 dan baru mulai terlihat peningkatan pada tahun 2025 sebesar 3.736,28 ton. Kondisi ini merepresentasikan gap antara norma regulasi dan realitas di lapangan yang menjadi salah satu fokus penelitian ini.

C. Kepemimpinan Fasilitatif (Facilitative Leadership)

Dimensi ketiga model Ansell & Gash (2008) adalah kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*), yang memainkan peran krusial dalam menjembatani berbagai kepentingan aktor yang berbeda, membangun kepercayaan, dan menjaga legitimasi proses kolaborasi. Kepemimpinan fasilitatif tidak harus berasal dari satu pihak tunggal, melainkan dapat bersifat distribusional di antara para aktor (Ansell & Gash, 2008).

Dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Cianjur, kepemimpinan fasilitatif dijalankan oleh tiga lapisan aktor. Pertama, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cianjur sebagai institusi pemerintah daerah yang menjadi inisiator dan koordinator utama program pengelolaan sampah. DLH telah menginisiasi berbagai program strategis, termasuk kerja sama bersama PT PLN dalam pengolahan sampah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP), sosialisasi Program Kampung Iklim, serta penguatan fungsi bank sampah di tingkat kelurahan dan desa. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 DLH Kabupaten Cianjur, Prihadi Wahyu Santosa, secara eksplisit menyatakan bahwa bank sampah yang ditunjang kebiasaan warga memilah sampah terbukti memperkecil

beban TPAS Mekarsari, dan menargetkan agar setiap kelurahan dan desa memiliki bank sampah.

Tim pendamping ISWMP-PPAM (Pengembangan Peran Aktif Masyarakat) hadir sebagai fasilitator teknis yang memberikan bimbingan langsung kepada warga. Melalui pendekatan intensif di tingkat lingkungan, tim ini berhasil mengubah perilaku warga RT 03 RW 14 Kelurahan Sawahgede dalam waktu dua bulan (Desember 2024-Februari 2025), dari yang semula tidak memilah sampah menjadi rutin memilah sampah organik dan anorganik setiap hari. Kepala kelurahan Sawahgede, Dendi Irawan, berperan sebagai pemimpin lokal yang menjembatani kepercayaan warga dengan program pemerintah, sekaligus menjadi motor penggerak replikasi pilot project ke wilayah lain (Parsaulian, 2025).

Meski kepemimpinan fasilitatif mulai terlihat, masih terdapat kelemahan dalam aspek keberlanjutan dan kapasitas. Ketergantungan yang besar pada fasilitator eksternal berpotensi melemahkan keberlanjutan kolaborasi jika program berakhir. Hal ini sejalan dengan Emerson & Nabatchi (2015) bahwa efektivitas collaborative governance dalam jangka panjang sangat ditentukan oleh internalisasi kapasitas kepemimpinan pada level lokal, bukan pada aktor eksternal.

D. Proses Kolaborasi (Collaborative Process)

Dimensi keempat dan paling dinamis dalam model Ansell & Gash (2008) adalah proses kolaborasi itu sendiri, yang mencakup: dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan pencapaian hasil sementara (*intermediate outcomes*). Proses kolaborasi yang baik bersifat siklikal dan adaptif, di mana setiap capaian sementara memperkuat motivasi aktor untuk melanjutkan dan memperdalam kolaborasi.

Proses kolaborasi di Kabupaten Cianjur yang paling terstruktur yaitu pilot project ISWMP di Kelurahan Sawahgede. Proses ini diawali dengan koordinasi formal antara DLH, tim ISWMP, dan pengurus RT/RW, diikuti sosialisasi ke warga, lalu penyediaan alat bantu pemilahan berupa dropbox, ember pilah, dan stiker rumah tangga yang memilah. Pemantauan harian dilakukan oleh petugas yang mencatat hasil pilahan, menimbang

sampah organik dan anorganik, serta memastikan kehadiran offtaker seperti pengelola maggot atau bank sampah (Fahrial, 2025).

Capaian sementara (*intermediate outcomes*) dari proses kolaborasi ini cukup signifikan. Dalam dua bulan, rata-rata 49–52 kg sampah organik berhasil dipilah setiap hari dari satu RT, sementara 10–20 kg sampah daur ulang anorganik berhasil dikumpulkan setiap harinya dan disetor ke bank sampah. Bank Sampah Baraya yang lahir dari komunitas ini bahkan memperoleh piagam bank sampah terbaik dari Bupati Cianjur, yang menjadi penanda legitimasi dan pengakuan formal atas inisiatif kolaboratif masyarakat (Parsaulian, 2025). Hasil ini secara langsung berkontribusi pada pengurangan beban TPAS Mekarsari yang kapasitasnya semakin tertekan.

Proses kolaborasi juga terlihat dalam kemitraan DLH dengan PT PLN melalui program pengolahan sampah menjadi BBJP, serta kerja sama dengan organisasi non-pemerintah dalam program edukasi lingkungan. Namun, proses kolaborasi ini masih terbatas pada skala lokal dan belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Cianjur. Dari 32 kecamatan yang ada, baru satu kelurahan yang menjadi lokasi pilot project terstruktur, sehingga dampaknya terhadap pengurangan timbunan secara agregat masih sangat minimal.

Diskusi

Temuan penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif dan kritis tentang perkembangan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Cianjur, dengan menggunakan kerangka analisis Ansell & Gash (2008) sebagai pisau bedah utama. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Cianjur berada dalam fase perkembangan awal (*emerging stage*), ditandai oleh tersedianya kerangka regulasi yang mulai matang, namun masih terbatasnya kapasitas implementasi di lapangan.

Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian Rizky et al., (2024) yang mengkaji model *collaborative governance* pengelolaan persampahan di Kabupaten Bogor. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *collaborative governance* sudah berjalan cukup baik namun belum optimal, karena kolaborasi dan pembagian kerja antar pemangku

kepentingan sudah terlaksana tetapi belum secara efektif. Kedua kabupaten ini sama-sama menghadapi tantangan klasik pengelolaan sampah di daerah perkotaan Indonesia: timbunan besar, kapasitas infrastruktur terbatas, dan partisipasi masyarakat yang belum maksimal. Persamaan ini mengindikasikan bahwa permasalahan tersebut bukan semata-mata persoalan teknis, melainkan juga persoalan tata kelola yang memerlukan reformasi sistemik.

Dari aspek regulasi, kehadiran Perda No. 10 Tahun 2025 yang mengamandemen Perda No. 6 Tahun 2021 merupakan langkah progresif yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat kerangka hukum pengelolaan sampah. Penambahan ketentuan mengenai pengelolaan sampah spesifik, pembiayaan, dan ketentuan pidana mengisi sejumlah kekosongan regulasi yang menjadi hambatan implementasi sebelumnya. Namun demikian, efektivitas regulasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas normatifnya, tetapi juga oleh kapasitas penegakannya. Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa regulasi persampahan yang baik sekalipun sering gagal diimplementasikan karena lemahnya kapasitas penegakan, minimnya insentif, dan rendahnya kesadaran publik (Achmad, 2024).

Kehadiran program ISWMP yang didukung Bank Dunia memberikan nilai tambah yang sangat signifikan dalam mempercepat pengembangan *collaborative governance* di Kabupaten Cianjur. RISPS yang telah disahkan melalui Perbup No. 26 Tahun 2024 merupakan dokumen strategis yang langka dimiliki oleh kabupaten-kabupaten di Indonesia, karena memberikan peta jalan pengelolaan sampah jangka panjang yang terintegrasi dengan proyeksi pembiayaan dan target terukur. Target jangka menengah pengangkutan langsung ke TPA pada 2028 sebesar 12,92% yang termuat dalam RISPS menunjukkan orientasi strategis pengurangan ketergantungan pada TPA. Hal ini sejalan dengan paradigma *circular economy* dan *zero waste* yang menjadi arah kebijakan persampahan global.

Pilot project yang berhasil di Kelurahan Sawahgede menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah dapat dicapai dalam jangka pendek jika didukung oleh pendampingan intensif, insentif sosial, dan infrastruktur yang memadai. Dari satu RT saja, 49–52 kg sampah organik per hari berhasil dipilah sebuah

angka yang signifikan jika dikalikan dengan ribuan RT yang ada di Kabupaten Cianjur. Artinya, potensi pengurangan sampah melalui pemilahan di sumber sangatlah besar, namun memerlukan replikasi sistematis yang didukung sumber daya memadai dan komitmen politik yang konsisten dari pemerintah daerah.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan *collaborative governance* tidak dapat dipisahkan dari faktor kepercayaan (*trust*) antar aktor. Pengakuan formal atas Bank Sampah Baraya melalui piagam dari Bupati Cianjur merupakan bentuk nyata penguatan kepercayaan dan legitimasi yang mendorong warga untuk terus berpartisipasi. Menurut Ansell & Gash (2008) kepercayaan merupakan modal sosial fundamental dalam proses kolaborasi dan dapat dibangun melalui pencapaian hasil sementara yang nyata dan diakui secara formal.

Di sisi lain, penelitian ini menemukan kontradiksi antara kebijakan dan implementasi. Pemerintah Kabupaten Cianjur menargetkan setiap kelurahan dan desa memiliki bank sampah, namun belum ada roadmap implementasi yang konkret mengenai sumber pembiayaan, mekanisme pendampingan, dan indikator keberhasilan yang terukur. Tanpa perencanaan implementasi yang rinci, target tersebut berisiko menjadi sebuah kebijakan yang tidak dapat terwujud.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Cianjur masih berada pada fase perkembangan awal (*emerging stage*). Analisis berdasarkan model Ansell dan Gash (2008) yang mencakup empat dimensi kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi mengungkapkan potret yang beragam. Dari aspek desain kelembagaan, Kabupaten Cianjur telah memiliki kerangka regulasi yang semakin kuat, ditandai oleh Perda No. 6 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Perda No. 10 Tahun 2025, Perbup No. 62 Tahun 2024 tentang UPTD Pengelolaan Sampah, serta RISPS yang disahkan melalui Perbup No. 26 Tahun 2024 sebagai peta jalan strategis jangka panjang.

Dari aspek proses kolaborasi, program ISWMP yang difasilitasi Bank Dunia berhasil mendemonstrasikan bahwa kolaborasi multipihak antara pemerintah,

masyarakat, bank sampah, dan sektor swasta mampu menghasilkan perubahan perilaku nyata dalam waktu singkat. Pilot project di RT 03 RW 14 Kelurahan Sawahgede (Desember 2024–Februari 2025) berhasil mengumpulkan rata-rata 49–52 kg sampah organik terpilah per hari dari satu RT saja, sekaligus membangun ekosistem bank sampah yang diakui secara formal oleh pemerintah daerah.

Namun demikian, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara norma regulasi dan implementasi di lapangan (gap antara *das sollen* dan *das sein*). Angka pengurangan sampah yang tercatat nol pada 2023 dan 2024, kapasitas pengangkutan yang hanya mampu menangani sekitar 13% dari total timbunan, serta cakupan pilot project yang baru menjangkau satu kelurahan dari puluhan kelurahan dan ratusan desa, menjadi indikator bahwa *collaborative governance* belum berjalan optimal secara agregat.

Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan: (1) penguatan mekanisme penegakan regulasi pengelolaan sampah disertai insentif ekonomi yang konkret bagi warga dan komunitas yang aktif memilah sampah; (2) replikasi sistematis pilot project ISWMP ke seluruh kecamatan dengan didukung anggaran APBD yang memadai dan panduan teknis yang terstandarisasi; (3) pembentukan forum kolaborasi multistakeholder formal yang berfungsi sebagai platform koordinasi reguler antara DLH, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga pendidikan; (4) penguatan program kapasitas bank sampah di tingkat kelurahan dan desa guna mempercepat realisasi target DLH bahwa setiap desa memiliki bank sampah; serta (5) pengintegrasian target pengelolaan sampah dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD) guna memastikan komitmen politik jangka panjang dan kontinuitas program lintas periode kepemimpinan.

Daftar Pustaka

- Achmad, F. Y. N. A. (2024). Tantangan Dan Peluang Implementasi Kebijakan Zero Waste Di Kota Baubau. *Journal Publicuho*, 7(1), 212–223.
<https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.348>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

- Choirul, S. (2020). Konsep, Pengertian, dan Tujuan Kolaborasi. *Dapu6107*, 1, 7–8.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Evaluating the productivity of collaborative governance regimes: A performance matrix. *Public Performance and Management Review*, 38(4), 717–747. <https://doi.org/10.1080/15309576.2015.1031016>
- Fahrial, F. (2025). *Mendorong Perubahan dari Lingkungan: Kabupaten Cianjur Tunjukkan Perbaikan Pengelolaan Sampah lewat Pilot Project ISWMP*. Suara Merdeka Jakarta. <https://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/13415938893/mendorong-perubahan-dari-lingkungan-kabupaten-cianjur-tunjukkan-perbaikan-pengelolaan-sampah-lewat-pilot-project-iswmp>
- Fikri, A. (2025). *Volume sampah naik jadi 3.990 ton selama Lebaran, DLH Cianjur gencarkan edukasi pemilahan sampah*. Antara Jabar. <https://jabar.antaranews.com/berita/596509/volume-sampah-naik-jadi-3990-ton-selama-lebaran-dlh-cianjur-gencarkan-edukasi-pemilahan-sampah?page=all>
- Gavrila, A. (2026, February 22). Sumber Sampah Indonesia 2025: Rumah Tangga Dominasi Timbulan Nasional. *Good Stats*. https://goodstats.id/article/persentase-sumber-sampah-indonesia-2025-rumah-tangga-dominasi-timbulan-nasional-GR9A5?utm_source=chatgpt.com
- Herlina, S., Silalahi, T. C., Syahla, K., & Marindra, P. (2025). *Segmentasi Kabupaten / Kota Jawa Barat Berdasarkan Sampah Terkelola Tahun 2024*. 160–168.
- Javani, A. N., & Iscahyono, A. F. (2024). Identifikasi Sistem Pengangkutan Sampah di Kecamatan Cianjur. *Institut Teknologi Nasional*, 623–628.
- Kanaya Avitadira, & Indrawati, N. (2023). Upaya Mengatasi Permasalahan Sampah di DKI Jakarta Tahun 2021 : Tinjauan Collaborative Governance. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 49–69. <https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.147>
- Nur Alam, A., Irma Purnamasari, A., & Ali, I. (2024). Analisis Tingkat Penanganan Sampah Di Jawa Barat Menggunakan Regresi Linier. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 8(1), 95–102. <https://doi.org/10.36040/jati.v8i1.8307>
- Nurmuslim, B. (2025, October 27). Waduh! Cianjur Produksi Sampah Capai 60.481 Ton Kurun Waktu 9 Bulan. *Logika News*. <https://logikanews.co/waduh-cianjur-produksi-sampah-capai-60-481-ton-kurun-waktu-9-bulan/>

- Pamungkas, T. S., Masqurin, S. N., & Sutomo, S. (2024). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jember. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 905–914.
<https://doi.org/10.54082/jupin.378>
- Parsaulian, D. (2025). *Dari Rumah Masing-Masing, Warga Sawahgede Jadi Pelopor Pilah Sampah di Cianjur*. https://mediaindonesia.com/humaniora/812469/dari-rumah-masing-masing-warga-sawahgede-jadi-pelopor-pilah-sampah-di-cianjur#goog_rewarded
- Princia, N. K. G. A., Widhiasthini, N. W., Dewi, N. L. Y., & Antari, P. B. W. (2026). *Implementasi Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Organik Berbasis Ekonomi Sirkular Di Bali*. 12–26.
- Raharja Samun Jaja. (2009). Kolaborasi Sebagai Strategi Bisnis Masa Depan. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 5(1), 44–53.
- Rizky, S. A., Saputra, A. P., & Asropi. (2024). Model Collaborative Governance Pengelolaan Persampahan Di Kabupaten Bogor. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 24(3), 241–248.
<https://doi.org/10.17509/jpp.v24i1.69274>
- Setiawandari, N. E. P., & Kriswibowo, A. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 149.
<https://doi.org/10.31258/jkp.v14i2.8218>
- Susanti, A. I. (2023). Mengenal Lebih Jauh Peran Bank Sampah. *Indonesiare.Co.Id*.
<https://www.indonesiare.co.id//id/article/mengenal-lebih-jauh-peran-bank-sampah>
- Virdhani, M. H. (2025). *Dorong Perubahan dari Lingkungan: Kabupaten Cianjur Tunjukkan Perbaikan Pengelolaan Sampah lewat Pilot Project ISWMP*. Disway.
<https://disway.id/read/899129/dorong-perubahan-dari-lingkungan-kabupaten-cianjur-tunjukkan-perbaikan-pengelolaan-sampah-lewat-pilot-project-iswmp>
- Winata, A. P., & Effendie, M. I. N. (2023). *Kajian Terhadap Penetapan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Sampah Mekarsari Cikalong Kulonkabupaten Cianjur Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor Sarana Persampahan Dan Penanganan Sampah Rumah Tangga*. 06(01), 39–51.